

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi jangkauan Hubungan Internasional tidak lagi membahas permasalahan mengenai dinamika antarnegara baik dalam segi perang dan konflik saja, namun pada era sekarang jangkauan atau permasalahan yang dihadapi sekarang berkembang mengarah kepada bagaimana hubungan antar aktor negara, non negara, maupun Organisasi internasional dalam meningkatkan faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam mencapai kesepakatan dan kepentingan nasional suatu negara (Azizah, 2017). Sebab setelah perang dunia ke-2 berakhir muncul perdebatan-perdebatan yang mempengaruhi dinamika politik baik global, ekonomi, maupun sosial dalam tatanan Hubungan Internasional hal ini terjadi atas kekalahannya Jerman dan sekutunya yang mengakibatkan meninggalnya hitler serta hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki (Kastori, 2022). Oleh karena itu semenjak perang dunia ke-2 terjadi perubahan besar dalam Hubungan Internasional di seluruh dunia dengan adanya perkembangan dalam hubungan antar negara dengan didirikannya United Nations (UN) atau yang kita kenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menciptakan perdamaian antar negara untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang di anggap gagal.

Sistem international pasca perang dunia ke-2 telah melibatkan atau memunculkan fenomena hadirnya Organisasi Internasional. Organisasi Internasional merupakan bagian penting dari politik global dunia dan tidak akan ada kelompok global yang saling berhubungan tanpa adanya Organisasi Internasional dengan itu Organisasi Internasional membentuk kerjasama yang melintasi batas-batas wilayah negara dan didasarkan pada struktur organisasi yang luas dalam menetapkan norma maupun standar, dan menerapkan hukum internasional serta dengan cara yang jelas dalam mencapai tujuan yang telah disepakati oleh pemerintah dengan pemerintah lainnya maupun non pemerintah itu sendiri, organisasi internasional memiliki sejumlah peranan penting dalam menyediakan

sarana kerja sama di berbagai bidang antar negara satu dengan negara lain didalamnya dengan memberikan wadah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi pada negara anggotanya sehingga menghasilkan keputusan bersama, Organisasi Internasional juga bukan hanya menjadi permasalahan dalam hal Kerjasama akan tetapi Organisasi Internasional dapat turut menjadi sebuah lembaga independent dalam melaksanakan kegiatan yang terjadi seperti permasalahan kemanusiaan, maupun lingkungan hidup (Oktadewi, 2018).

Menurut Dr. Clive Archer dilansir dari bukunya Organisasi Internasional mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai struktur organisasi sistematis yang didirikan berdasarkan kesepakatan antara para anggota baik pemerintah maupun non-pemerintah dari dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan para anggotanya, oleh karena itu Clive Archer menegaskan bahwa terbentuknya sebuah Organisasi Internasional didasari dari adanya tiga elemen penting yaitu struktur yang menjadikan peran Organisasi Internasional sebagai wadah bagi para anggotanya dalam melaksanakan permasalahan serta mencapai tujuan bersama melalui kesepakatan seperti perjanjian ataupun dokumen konstituen, lalu ada forum sebagai tempat pertemuan bagi para anggotanya untuk berdiskusi tentang tujuan yang akan disepakati maupun melakukan kerjasama dalam mencapai suatu kesepakatan secara adil, dan terakhir sebagai keanggotaan yang sifatnya independent menjadikan Organisasi Internasional memiliki kewenangan dalam melakukan apapun tanpa adanya pengaruh dari pihak lain (Archer, 2001).

Pada hakekatnya Organisasi Internasional memiliki peran yang sangat signifikan dalam Hubungan Internasional memiliki kepentingan dalam menyelesaikan atau mengatasi permasalahan dunia yang tidak selesai selesai semenjak terjadinya Perang Dunia II di mana pada tahun 1941 Presiden AS Franklin D. Roosevelt dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill memikirkan hal yang sama mengenai akibat yang dihasilkan pasca Perang Dunia II, sehingga mereka berencana untuk membentuk Piagam Atlantik yang berisikan masing-masing negara tidak dilarang untuk melakukan ekspansi, hubungan antar negara harus bersifat kooperatif dan perselisihan yang dialami negara

pascaperang harus diselesaikan dengan cara negosiasi dan yang paling penting dalam perjanjian ini kedua negara sepakat untuk membentuk atau mengizinkan pemulihan pemerintahan sendiri bagi negara jajahan pasca perang (Office of the Historian, 2021)

Pada tahun 1945 dibentuk organisasi *United Nations* (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai penjaga dan perdamaian internasional dalam mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah internasional seperti kemiskinan, penyakit, dan hak asasi manusia serta mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya diantara negara-negara anggotanya. Pembentukan organisasi PBB ini awalnya dipicu oleh kebutuhan dalam membentuk suatu organisasi internasional setelah kehancuran pasca Perang Dunia II membuat kondisi sistem keamanan mengalami hambatan, oleh karena itu sistem internasional pascaperang memberikan tantangan bagi PBB dalam mengimplementasikan sistem keamanan kolektif karena keanggotaan sistem internasional yang berbeda. Namun pada Perang dingin mengalami perpecahan dengan adanya dua kubu antara blok barat (Amerika Serikat) dan blok timur (Uni Soviet) disebabkan adanya sifat ganda PBB sebagai dewan negosiasi antar negara dan wadah untuk mempengaruhi opini internasional, baik Uni Soviet dan Amerika Serikat menggunakan PBB sebagai alat propaganda dan karena masing-masing negara memiliki larangan membuat negosiasi terhenti dan konflik berkepanjangan (Khan Academy, 2015).

Sistem internasional pasca Perang dingin memberikan tantangan bagi PBB dalam mengimplementasikan tujuannya, kehadiran blok aliansi perang dingin tentu saja memberikan pengaruh terhadap fungsi PBB khususnya dalam memberikan kontribusi pada stabilitas dunia yang semakin memperumit dalam implementasi sistem yang lebih aman dan damai (Hanrieder et al., 2015). Puncak perubahan ini terjadi pasca perang dingin dunia mengalami perdebatan besar yang mempengaruhi dinamika global, hal ini dikarenakan perubahan yang diakibatkan dengan runtuhnya Uni Soviet dan runtuhnya kaum komunisme menandakan bahwa kemenangan AS menandakan kemenangan demokrasi liberal atas kekuatan sosialis komunis membuat kekuatan negara-negara yang pada awalnya ditentukan oleh keterlibatan blok timur (keamanan) berganti posisi negara

diperkuat melalui keterlibatan blok barat (perdagangan). Dampak dari berakhirnya perang dingin juga tentu saja telah merubah pandangan isu-isu Hubungan Internasional yang pada awalnya tertuju pada isu-isu *High-Politics* yang berkaitan dengan sistem politik dan keamanan suatu negara, namun kini isu-isu *Low-Politics* seperti pengaruh sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ekonomi, dan terorisme dianggap sama penting dengan isu *High-Politics*. Maka setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1991, tatanan dunia berharap akan terciptanya dunia yang lebih damai, aman dan sejahtera, dengan itu sampai saat ini isu pembangunan maupun kerjasama telah menjadi fokus penting dalam sistem politik internasional (Perdana, 2011).

Di era globalisasi sekarang dengan perkembangan zaman yang pesat membuat peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih turut hadir untuk membantu maupun menyelesaikan permasalahan bersama bagi seluruh masyarakat global. Organisasi internasional yang berisikan 193 anggota ini terus melaksanakan forum tahunan untuk membahas permasalahan seperti perdamaian dan keamanan, maupun permasalahan-permasalahan baru yang semakin bermunculan dan menarik perhatian dunia. Salah satunya isu lingkungan yang menjadi masalah dunia dari tahun ke tahun karena dampaknya sendiri sangat luas hampir di semua negara mengalami permasalahan lingkungan.

Isu paling mendesak adalah perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca dari negara-negara industri, bukan hanya itu faktor lain dari isu lingkungan dapat dilihat dari pencemaran air yang diakibatkan limbah pabrik maupun dari aktivitas masyarakat dalam berumah tangga. Melihat permasalahan yang sangat penting bagi semua negara tentu saja *United Nations* (UN) terdorong untuk membentuk sebuah badan atau lembaga yang berperan dalam menangani aspek lingkungan yaitu *United Nations Environmental Programme* (UNEP). *United Nations Environmental Programme* (UNEP) adalah badan khusus yang difokuskan sebagai solusi atas kekhawatiran dunia akan masalah lingkungan yang semakin meningkat. UNEP bekerja sama dengan pemerintah masyarakat sipil, maupun badan-badan PBB dalam mengatasi tatanan lingkungan hidup. UNEP juga didirikan untuk mendorong

perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup secara global dengan cara membantu negara-negara menuju ekonomi hijau, memperkuat undang-undang dan pengelolaan lingkungan hidup, melindungi ekosistem serta memberikan informasi maupun menginspirasi dalam meningkatkan kualitas hidup tanpa mengorbankan kualitas hidup untuk generasi mendatang. Hal ini bertujuan untuk mendorong dalam melakukan perubahan serta mengatasi masalah transformasional dari tiga penyebab krisis planet salah satunya perubahan iklim (UNEP, 2023a).

Perubahan iklim secara signifikan mengacu pada perubahan yang berjangka panjang pada pola iklim dan cuaca di bumi yang nantinya berdampak luas ke berbagai sektor kehidupan manusia. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) mendefinisikan perubahan iklim sebagai kondisi iklim yang secara signifikan di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama biasanya berpuluh-puluh tahun atau lebih, perubahan ini tentu saja memiliki dampak yang merugikan baik terhadap komposisi, keberlanjutan maupun produktivitas pada ekosistem alami, sosial-ekonomi, maupun kesehatan serta kesejahteraan manusia (United Nations Framework Convention on Climate Change, n.d.). Selain itu perubahan tersebut bisa disebabkan secara tidak langsung maupun tidak langsung seperti halnya kelebihan panas pada sistem iklim yang disebabkan oleh penambahan gas rumah kaca ke atmosfer. Gas rumah kaca tambahan ini sebagian besar dihasilkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil (batubara, minyak dan gas alam), penggundulan hutan, pertanian, dan perubahan penggunaan lahan. Pengaruh iklim lainnya juga bisa diakibatkan secara alamiah, seperti gunung berapi, energi matahari, dan variabilitas alam, hal ini tentu saja dapat menyebabkan perubahan suhu yang sangat signifikan, curah hujan seperti badai maupun kemarau panjang, naiknya permukaan laut, serta gelombang panas (Climate Change Knowledge Portal, 2021).

Oleh karena itu perubahan iklim menimbulkan tantangan dan risiko yang sangat signifikan khususnya terhadap keanekaragaman hayati, Masyarakat manusia, ekonomi, maupun kestabilan bumi secara keseluruhan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang baik suhu, pola

curah hujan, permukaan air laut maupun tingginya curah hujan akibat dari aktivitas manusia, dan emisi gas rumah kaca. Fenomena-fenomena tersebut tentu saja memiliki beberapa implikasi mendasar terhadap lingkungan salah satunya pengaruh terhadap kualitas dan polusi air. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kondisi perubahan pola cuaca serta peningkatan suhu yang dapat meningkatkan frekuensi serta tingkat curah hujan yang tinggi menyebabkan banyaknya limpasan, limpasan inilah yang nantinya dapat membawa polutan, seperti sedimen, pupuk, pestisida, dan lainnya ke, dalam permukaan air sehingga menyebabkan pencemaran air.

Pencemaran air merupakan kondisi di mana air terkontaminasi oleh bahan kimia, limbah, atau zat lain yang dapat membahayakan Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Air yang tercemar biasanya berasal dari sumber berbeda, seperti industri, pertanian, limbah rumah tangga, dan aktivitas manusia lainnya. Pencemaran air ini juga dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti penyakit kulit, gangguan pernafasan bahkan kematian, selain itu pencemaran air dapat merusak ekosistem perairan, mengurangi sumber air bersih, dan mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan yang bergantung pada air. Oleh karena itu penting untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengurangan pencemaran air, seperti pengelolaan limbah yang baik, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan air (Arif, 2020).

Mengingat air merupakan komponen paling penting di bumi untuk keberlangsungan kehidupan di planet ini. Air juga merupakan bagian wajib, terhitung sekitar 75% dari dunia ini termasuk bumi, kerak bumi merupakan komponen alami penting yang diperlukan untuk keberadaan semua jenis kehidupan yang ada di permukaan. Namun permasalahannya sumber alami ini dipengaruhi oleh berbagai jenis aktivitas alam dan buatan yang dilakukan manusia, kegiatan atau aktivitas tersebut dapat mengubah perubahan air dengan melepaskan bahan kimia dan produk organik maupun anorganik beracun secara tidak langsung maupun langsung. Akibatnya karakteristik air tawar dan manusia yang hidup disekitarnya terkena dampak negatif, berbagai bahan kimia

beracun ini berasal dari industri yang menyebabkan musnahnya kehidupan di permukaan air menjadi hancur (Chaudhry FN and Malik MF, 2017).

Salah satu sumber pencemaran air yang paling signifikan adalah limbah dari industri pabrik, hal ini dikarenakan potensi pencemaran air lebih banyak diakibatkan oleh aktivitas manusia dibandingkan proses alam atau geologi, faktor lainnya juga terjadi di negara berkembang di mana banyaknya bukti bahwa sumber utama degradasi badan air dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan industri dan juga urbanisasi di wilayah tersebut. Karena adanya bahan kimia itulah membuat permukaan air menjadi tidak sehat untuk diminum menjadikan kurangnya pasokan air minum yang nantinya dapat merugikan perekonomian negara dan mengganggu terhadap keberlangsungan hidup yang nantinya merugikan ekosistem serta kesehatan manusia secara keseluruhan (Chaudhry FN and Malik MF, 2017).

Hal yang menjadikan banyaknya industri pabrik di negara berkembang dikarenakan fenomena deindustrialisasi yang telah terjadi di negara-negara maju dalam menciptakan lapangan kerja dan peran terhadap PDB telah menurun. Menurut Rodrik, salah satu penyebab terjadinya deindustrialisasi di negara maju adalah relokasi industri ke negara berkembang, yang berakibat pada berkurangnya permintaan tenaga kerja pada sektor industri di negara tersebut, pada tahun 2013 telah terjadi perpindahan industri manufaktur secara signifikan oleh negara maju ke negara berkembang (Asia). Faktor yang menjadi pemindahan sektor-sektor industri besar ini adalah:

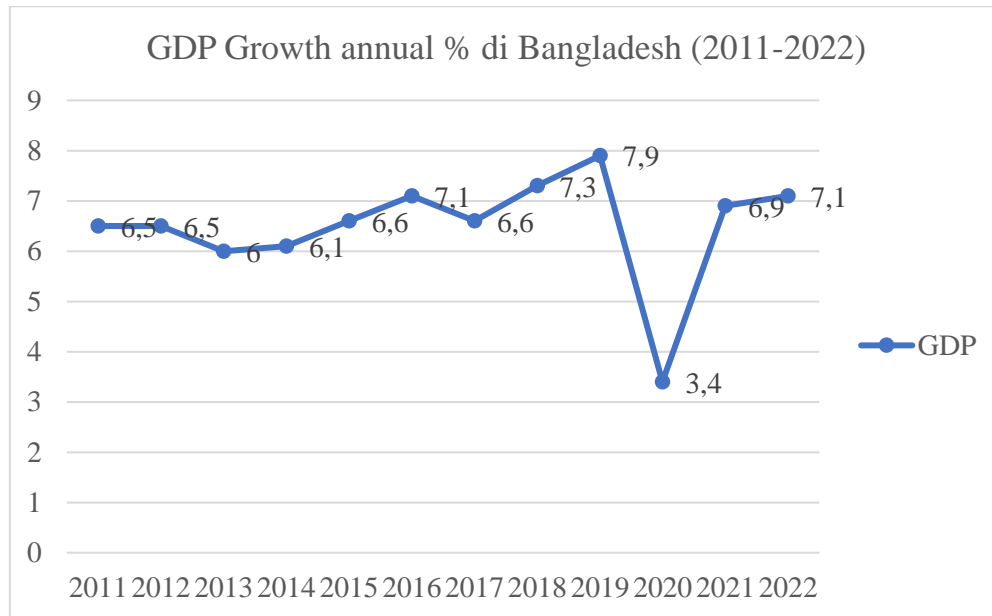
1. Biaya tenaga kerja, di mana perbedaannya ketersediaan tenaga kerja yang lebih murah di negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju hal inilah yang menjadi salah satu penyebab relokasinya industri-industri besar.
2. Banyaknya tenaga kerja, negara-negara berkembang seringkali memiliki populasi yang besar atau banyak sehingga menciptakan tenaga kerja yang cukup untuk industri.

3. Peraturan yang kurang ketat, hal ini juga bisa menjadi acuan dalam adanya deindustrialisasi sehingga banyaknya perpindahan industry negara maju ke negara berkembang. Dikarenakan beberapa negara berkembang memiliki peraturan yang kurang ketat mengenai standar lingkungan, undang-undang ketenagakerjaan, dan peraturan keselamatan kerja.
4. Akses ke pasar berkembang, hal ini juga dapat menjadi poin penting dikarenakan negara-negara berkembang seringkali memberikan akses ke pasar di wilayah tersebut sehingga negara-negara berkembang juga secara tidak langsung memungkinkan Perusahaan untuk mengembangkan dan melayani kebutuhan pasar di wilayah tersebut.

Hal-hal itulah yang memungkinkan negara maju untuk mentransfer atau menindahkan sebagian produksi industrinya ke negara berkembang dikarenakan keuntungan yang dihasilkan sangat besar dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak juga membuat sebagian negara-negara maju terdorong untuk mendirikan fasilitas produksi di negara-negara tersebut (Rodrik, 2016).

Maka dari itu negara berkembang memiliki potensi sumber daya manusia yang melimpah sebagaimana yang sudah dipaparkan menurut Dani Rodrik, salah satunya negara yang memiliki potensi tersebut Bangladesh. Bangladesh sudah menjadi sektor industri yang sangat besar dan dinamis di mana dengan Sejarah produksi tekstil yang melimpah membuat 80% ekspor tekstil berasal dari negara Bangladesh, jadi sudah tidak heran jika negara ini menjadi komoditas tertinggi dalam pasar tekstil global. Adanya komoditas ekspor tekstil tersebut membuat Bangladesh memiliki peran yang sangat penting dalam industri mode dan menjadikan Bangladesh sebagai pemasok produk-produk fashion, garmen, dan apparel, jadi sudah tidak heran dengan adanya label yang mengatasnamakan “*Made in Bangladesh*” ditemukan di produk-produk ternama di seluruh dunia dikarenakan totalnya sendiri sudah sebanyak 150 negara yang mengimpor produk apparel maupun bahan tekstil ke negara Bangladesh (KADIN Net Zero Hub, 2022). Seperti data

dibawah ini menunjukkan perkembangan mulai dari peningkatan amupun penurunan GDP di negara Bangladesh yang dikeluarkan oleh *The World Bank*, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Data *GDP Growth annual %* di Bangladesh (2011-2022) (*The World Bank, n.d.*)

Menurut grafik *The World Bank* pada tahun 2011-2022, dalam data PDB pada tahun 2011-2012 ekonomi Bangladesh tumbuh diatas 6% kenaikan ini terjadi dari bidang manufaktur dan kontruksi membuat sektor pertanian melimah selama dua tahun dan juga faktor dari pertumbuhan selama dua tahun secara berturut-turut itu juga diakibatkan dari adanya sektor jasa yang meningkat (*The World Bank, 2011*). Namun pada tahun 2013 PDB Bangladesh menurun menjadi 6% dari 6,5% hal ini terjadi dari lemahnya bidang ekspor dan investasi akibat krisis yang terjadi di kawasan eropa mengakibatkan kendala pasokan serta kerusakan di dalam negeri berkontribusi atas keterlambatan pertumbuhan (*The World Bank, 2013*). Namun pada tahun 2014 Bangladesh Development mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat karena dipengaruhi oleh stabilitas politik dan stabilitas makroekonomi, yang mengarah pada peningkatan PDB sebesar 6,1% di mana peningkatan ekonomi ini tumbuh lebih cepat dan tinggi dari sebelumnya sampai tahun 2016 di mana Bangladesh menjadi negara berkembang dengan jumlah populasi lebih dari 20 juta yang mencatat pertumbuhan di angka 7% pada tahun

2016. Titik tertinggi dari pertumbuhan PDB Bangladesh terjadi pada tahun 2017-2019 di mana angka PDB hampir menyentuh 8% angka tersebut mengalami peningkatan dikarenakan oleh peningkatan ekspor dan pengiriman uang yang meningkat sampai 9% membuat perekonomian Bangladesh semakin kuat (The World Bank, 2019). Namun akibat pandemic COVID-19 mengalami penurunan ekonomi menjadi 3,4% di mana hal ini disebabkan oleh 444 perusahaan yang mengalami penurunan, seperti yang kita tahu bahwa pandemic COVID-19 memiliki dampak yang merugikan pada kegiatan ekonomi bukan hanya Bangladesh akan tetapi semua di semua negara, namun demikian sehubungan dengan adaptasi yang dilakukan oleh negara Bangladesh dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi membuat peningkatan pembangunan ekonomi secara keseluruhan buktinya pada tahun 2020-2021 ekonomi Bangladesh tumbuh sebesar 6,9% dan pada tahun 2022 mencapai pertumbuhan sampai 7,1% peningkatan ini terjadi dikarenakan perkapita dan pendapatan per kapita nasional yang meningkat secara signifikan dengan total mencapai 78,44% (Bangladesh Economic Review, 2022).

Jika dilihat dari peningkatan PDB yang dialami oleh Bangladesh bukan menjadi alasan bahwa negara Bangladesh menjadi satu satunya negara yang berfokus dalam industri tekstil khususnya dalam bidang ekspor dan investasi. Pada tahun 2021 muncul pusat-pusat industri tekstil dengan produknya yang lebih rendah dibandingkan Bangladesh, yaitu Vietnam sebesar \$29,80 miliar. Namun dibalik terdapatnya saingan dari negara lain bukan menjadi tantangan besar bagi Bangladesh karena sektor garmen yang dimiliki oleh Bangladesh dengan seiring berjalannya waktu mengalami kenaikan dan terus berkembang sebanyak \$35,81 miliar. Hal ini diakibatkan dengan banyaknya Perusahaan multinasional yang berinvestasi dengan Bangladesh untuk mengambil keuntungan di sektor wilayahnya, dikarenakan negara ini merupakan rantai pasokan fashion global yang sangat penting dan harga biaya tenaga yang murah, menjadikan industri ini terus berkembang seiring dengan upaya Perusahaan dalam menghadapi tantangan terkait kondisi kerja dan daya saing menjadikan Bangladesh sebagai negara kedua di Asia setelah China dalam bidang ekspor garmen (Zaman, 2023).

Meskipun Bangladesh bukan kiblat dalam segi fashion global nyatanya peran Bangladesh sangat penting dalam hal ini mengingat industri fashion yang memiliki siklus tren yang cepat berubah membuat industri ini dapat diterima secara luas oleh semua kalangan Masyarakat dari waktu ke waktu. Namun demikian, industri tekstil yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di Bangladesh menghasilkan limbah kimia yang sangat berbahaya terhadap lingkungan, secara umum industri tekstil ini memberikan sekitar 5-8% emisi karbon dan penggunaan air yang menyebabkan pencemaran air sebanyak 15-20%. Menurut laporan organisasi *Global Fashion Agenda* industri fashion berkontribusi dalam menyumbang 4% dari emisi karbon global, 80% dari semua pakaian yang ditimbun maupun dibakar, 20-50% upah yang layak diberikan kepada tenaga kerja, dan yang terakhir 35% polusi mikroplastik di lautan (Global Fashion Agenda, 2023).

Bukan hanya itu Bangladesh menghadapi tantangan yang semakin besar karena sebagian besar pabrik tekstil dan garmen berlokasi di beberapa kota besar, kurang lebih sekitar 3000 pabrik yang beroperasi di kota Dhaka dan Sebagian besarnya lagi berada di kota Gazipur dan Narayanganj yang lokasinya sendiri tidak jauh dari pusat kota Dhaka. Di Bangladesh sendiri sebanyak 2 juta ton pewarna telah diubah menjadi limbah selama proses pencelupan, percetakan, dan penyelesaian akhir, limbah limbah yang dihasilkan dari pabrik tekstil dan garmen ini juga tidak diolah secara langsung sehingga menyebabkan lebih dari 200 sungai di wilayah Bangladesh mengalami pencemaran air (Hussein, 2024). Pada tahun 2016 terdapat sekitar 217 juta meter kubik sampah disungai Bangladesh dan jumlah ini meningkat pada tahun 2021 sebesar 349 juta meter kubik. Sebuah studi *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa sungai di Bangladesh ditemukan konsentrasi metronidazole sebanyak 300 kali yang membuat Sungai di wilayah ini sudah tercemar senyawa antibiotic tertinggi dibandingkan di sungai-sungai negara lain, selain itu ada juga tanaman dan sayuran yang diambil di daerah tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk pencelupan pabrik tekstil (Singh, 2019).

Bangladesh mencoba untuk memperbaiki masalah ini akan tetapi langkah yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi polusi yang disebabkan oleh industri tekstil

dan garmen tidak ada satupun yang berhasil dilakukan secara sempurna dan komprehensif. Sementara dalam pandangan UNEP menjelaskan bahwa pada tahun 2019 melalui PBB telah meresmikan aliansi untuk fashion khususnya dalam fokus sustainable fashion yang dinamai United Nations Alliance for Sustainable Fashion yang berisi 10 anggota organisasi internasional diantaranya program kemitraan *The World Bank Group's Global* dengan *Connect4Climate*, *International Labour Organization (ILO)*, *Ethical Fashion Initiative (ITC)*, *UN Development Programme (UNDP)*, *United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)*, *UN Global Compact*, *UN Office for Partnership*, *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *United Nations Climate Change Global Climate Action*, *United Nations Industrial Development Organization*. Aliansi ini memiliki tujuan untuk dapat ikut berkontribusi dalam program SDG melalui aksi yang dilakukan dalam sektor fashion, selain itu aliansi ini juga berkerja sama dengan badan-badan PBB, sektor swasta, pemerintah, LSM, dan pemangku lainnya untuk mencapai tujuan Bersama (UN Alliance for Sustainable Fashion, 2023).

Maka dari itu yang menjadikan latar belakang penulis sebagai poin penting dalam penelitian ini mengenai tren industri fashion yang terjadi khususnya diakibatkan oleh adanya pengaruh pabrik industri tekstil dan garmen di Bangladesh, membuat akibat yang dihasilkan dari adanya limbah kimia tersebut menghasilkan pencemaran air yang sangat signifikan di wilayah tersebut. Melihat hal ini UNEP selaku organisasi yang hadir dalam mengatasi permasalahan lingkungan fokus terhadap permasalahan yang terjadi di Bangladesh dikarenakan industri ini menyebabkan pencemaran yang sangat signifikan. Dari pengelolaan yang buruk di masing-masing garmen membuat dampak ekosistem sehingga banyaknya Sungai-sungai di sekitaran wilayah tersebut tercemar dan kualitas lingkungan di daerah tersebut menjadi buruk. Dengan mengeluarkan sebuah program *UN Alliance for Sustainable Fashion Program* dalam mempromosikan keberlanjutan industri fashion dan berfokus dalam mengurangi dampak lingkungan dengan cara mengajak pemerintah, badan PBB, Produsen, dan Masyarakat untuk melakukan kolaborasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini

menjadi sebuah judul penelitian yang berjudul “**Peran *United Nations Environmental Programme* (UNEP) dalam Menangani Pencemaran Air di Bangladesh**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan pada penelitian yaitu, “**Bagaimana peran yang dilakukan UNEP dalam mengatasi pencemaran air di Bangladesh akibat dari adanya industri fashion melalui *UN Alliance for Sustainable Fashion Program***”

1.3. Pembatasan Masalah

Mengenai masalah yang penulis paparkan sebelumnya, penulis memfokuskan pada peran organisasi internasional yaitu *United Nations Environment Programme* (UNEP) selaku organisasi yang membantu mengatasi permasalahan lingkungan melalui salah satu programnya yaitu “*UN Alliance for Sustainable Fashion Program*” dalam mengatasi permasalahan industri fashion dengan cara mengajak pemerintah, badan PBB, produsen, dan masyarakat untuk melakukan kolaborasi di Bangladesh yang berakibat pada pencemaran air di wilayah tersebut. Penelitian ini dibatasi pada masalah dari tahun 2019-2023 dikarenakan 2019 di mana awal dari pembentukan program *UN Alliance for Sustainable Fashion Program* dan peningkatan PDB di Bangladesh yang hampir meyentuh angka 8% membuat industri tekstil dan garmen menjadi poin penting dalam pertumbuhan ekonomi negaranya. Selain itu adapula pada tahun 2021 merupakan tahun di mana meningkatnya sampah di sungai sebesar 349 juta meter kubik dan sampai pada tahun 2023 sungai-sungai di Bangladesh masih mengalami permasalahan pencemaran air yang diakibatkan oleh industri tekstil menjadikan isu ini sebagai permasalahan yang sangat penting sehingga dibuatlah jangka 5 tahun untuk menyelesaikan masalah pencemaran air yang terjadi di Bangladesh.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang yang sudah dipaparkan, maka terdapat tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui peran United Nations Environment Programme (UNEP) sebagai organisasi yang fokus terhadap permasalahan lingkungan dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Bangladesh akibat dari adanya industri fashion.
2. Menganalisis adanya kondisi industri fashion di Bangladesh.
3. Mengetahui bagaimana implementasi *UN Alliance for Sustainable Fashion Program* dari UNEP yang berkerjasama dengan pemerintah Bangladesh mengatasi masalah pencemaran air melalui bentuk kolaborasi di Bangladesh akibat dari adanya industri fashion.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini juga penulis berharap dapat memberikan beberapa kegunaan buat peneliti selanjutnya yang berfokus dalam peran UNEP melalui program *UN Alliance for Sustainable Fashion Program* dalam mengatasi pencemaran air di Bangladesh.

1. Dalam kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori Organisasi Internasional dan isu lingkungan global negara di Bangladesh.
2. Dapat berguna bagi penelitian dalam keterikatan/peran Organisasi Internasional mengatasi masalah pencemaran air di Bangladesh serta dapat memberikan pandangan baru dalam permasalahan lingkungan baik secara akademik maupun Masyarakat umum dalam mencegah terjadinya pencemaran air yang diakibatkan dari adanya industri fashion.
3. Penelitian ini sebagai syarat dalam menempuh program studi S-1. Yaitu, dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Pasundan